

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara tentunya mempunyai kedaulatan atas wilayah masing-masing, khususnya wilayah laut. Kedaulatan (*sovereignty*) negara atas laut adalah suatu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh negara tertentu atas bagian tertentu dari laut dalam bagian wilayah laut secara terbatas.¹ Kedaulatan negara atas wilayah laut tersebut menjadi dasar perjanjian atau kesepakatan antarnegara. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara atas wilayah laut tertentu menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati oleh negara lain dalam lingkup internasional.²

Laut memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Sebagai sumber makanan, sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional, tempat bersenang-senang dan rekreasi, alat pemisah atau pemersatu bangsa, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu fungsi laut semakin meningkat dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dimungkinkan untuk mengambil kekayaan-kekayaan alam yang berada di dasar laut di bawahnya.³ Banyaknya potensi kekayaan yang dapat dimanfaatkan membuat negara-negara sadar akan pentingnya wilayah laut bagi ketahanan suatu bangsa. Negara-negara berkepentingan untuk menguasai

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, hlm. 10 diakses 27 Agustus 2019 pukul 14.43 WIB.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Salatiga, hlm. 41 diakses 29 Agustus 2019 pukul 08.40 WIB.

³ Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, hlm. 1 diakses 5 September 2019 pukul 00.21 WIB.

wilayah laut dengan menggunakan berbagai cara untuk dapat menguasai potensi yang terkandung di dalamnya tanpa memperhatikan kedaulatan negara lain, sehingga hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya pengaturan mengenai hukum laut internasional.

Mengingat adanya wilayah kedaulatan suatu negara atas laut, maka perlu ditetapkannya batas wilayah laut yang jelas antarnegara dengan tujuan agar tidak terjadi konflik antarnegara mengenai sengketa perbatasan wilayah laut. Adanya batas wilayah antarnegara menjadi wujud manifestasi bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Ketidakpastian mengenai batas wilayah antar negara menjadi hal yang perlu dihindari karena akan berdampak pada kedaulatan wilayah suatu negara.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ditentukan bahwa laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.⁴ Menurut Hadiwijoyo, batas adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik berupa tanda alamiah maupun buatan.⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603, Sekretariat Negara, Jakarta diakses 18 Maret 2019 pukul 17.36 WIB.

⁵ Hadiwijoyo, 2008, "*Batas Wilayah Negara Indonesia*" dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-batas-wilayah-negara/9288/2>, diakses 19 Maret 2019 pukul 00.32 WIB.

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menentukan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/aspek fungsional.⁶ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa batas wilayah laut adalah satu keutuhan yang dipisahkan antara satu wilayah dengan wilayah lain dalam ruang perairan di muka bumi yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.

Perbatasan mengenai wilayah suatu negara menjadi hal yang esensial dalam menentukan batas wilayah antarnegara. Untuk menentukan batas wilayah laut di suatu negara perlu dilakukan melalui proses perundingan atau negosiasi dalam bentuk perjanjian antarnegara untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai batas wilayah laut antarnegara tersebut. Perbatasan antar wilayah suatu negara dapat ditandai dengan beragam tanda, salah satunya adalah selat. Selat adalah suatu wilayah perairan sempit yang memisahkan dua atau tiga daratan yang menghubungkan dua jalur pelayaran dan menjadi jalur penghubung wilayah laut antarnegara.⁷ Selain itu, selat juga dapat menjadi jalur pelayaran dan perdagangan antarnegara, salah satunya adalah Selat Malaka.

⁶ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Sekretariat Negara, Jakarta diakses 19 Maret 2019 pukul 22.12 WIB.

⁷ Sulaiman Nitiatma, 1995, *Hukum Internasional Teritorialitas*, Penerbit CV. Indriajaya, Semarang, hlm. 16 diakses 28 Agustus 2019 pukul 17.53 WIB.

Selat Malaka adalah suatu selat Internasional⁸ yang terletak di antara Bagian Timur Pulau Sumatra (Indonesia), bagian barat Semenanjung Peninsula (Malaysia) dan Pulau Singapura yang berada pada tiga batas negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Letaknya yang sangat strategis inilah yang menjadikan Selat Malaka kerap kali digunakan sebagai jalur atau pusat pelayaran dan perdagangan dunia. Selain letaknya yang sangat strategis, Selat Malaka juga menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Dalam hal ini, keberadaan Selat Malaka juga memperpendek jalur perdagangan dari Teluk Persia menuju kawasan Asia Timur. Panjang Selat Malaka mencapai 960 km, dengan lebar selat mencapai 70 km dan lebar selat terpendek berada di Singapura, yaitu 2,8 km dengan kedalaman 25 m.⁹

Sebagai selat internasional, Selat Malaka memegang peranan penting bagi jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Selat Malaka acap kali dilewati oleh kapal-kapal asing dari berbagai negara dengan berbagai kepentingan. Singapura sebagai negara pantai yang wilayah lautnya merupakan bagian dari selat Malaka mengambil kebijakan untuk memperluas wilayah daratannya dengan cara melakukan reklamasi di sekitar laut. Kebijakan terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura ini menjadi salah satu potensi

⁸ Selat Internasional menurut Pasal 37 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) adalah selat yang digunakan dalam pelayaran internasional di antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya.

⁹ Nadia Nurani Isfarin, 2012, Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka dari Pencemaran Minyak Lintas Batas dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 Nomor 2 September 2012, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 206-224 diakses 27 Agustus 2019 pukul 23.41 WIB.

timbulnya permasalahan antara Singapura dengan Selat Malaka. Hal ini dikarenakan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura secara berkesinambungan dapat berimplikasi terhadap status Selat Malaka sebagai selat internasional. Dalam hukum internasional, kegiatan reklamasi secara spesifik tidak dilarang karena pada umumnya kegiatan reklamasi dilakukan di dalam perairan yang menjadi wilayah kedaulatan negara.¹⁰

Dalam hal ini, Singapura menyadari bahwa wilayah kedaulatannya strategis, namun luas wilayah daratannya sempit, sehingga Singapura mengambil kebijakan untuk mengatasi keterbatasan wilayahnya tersebut untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya dengan melakukan perluasan di wilayah daratannya, salah satunya dengan cara melakukan reklamasi di sekitar wilayah lautnya. Kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura menjadi hal yang berdampak terutama terhadap status selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional. Implikasi terhadap kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura tentunya tidak hanya berdampak pada negara saja, tetapi juga berdampak pada masyarakat internasional dikarenakan Selat Malaka menjadi salah satu jalur penghubung dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan dunia.¹¹ Oleh karena itu, negara yang berbatasan langsung dengan selat tidak boleh menghambat jalur pelayaran dan harus mengumumkan setiap saat adanya bahaya yang mungkin timbul terhadap jalur

¹⁰ Yang dimaksud dengan reklamasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperluas suatu wilayah yang dilakukan secara sengaja oleh negara tertentu dengan melakukan pengurukan wilayah.

¹¹ Rosiana Haryanti, 2019, "*Menyoal Istilah Pantai dan Pulau Reklamasi*" dalam <https://properti.kompas.com/read/2019/06/24/180540521/menyoal-istilah-pantai-dan-pulau-reklamasi?page=all> diakses 27 Agustus 2019 pukul 23.03 WIB.

pelayaran di dalam atau di atas selat yang diketahuinya.¹² Apabila kebijakan reklamasi yang dilakukan Singapura terus dilakukan tanpa memperhatikan aspek lain, maka hal ini akan berdampak pada berkurangnya fungsi selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional.

Pada prinsipnya, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura memang tidak mengganggu wilayah kedaulatan negara lain. Namun, jika kegiatan reklamasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan akan mengakibatkan wilayah daratan Singapura semakin luas dan wilayah lautnya semakin sempit dan dangkal. Hal ini tentunya akan berdampak pada terganggunya jalur pelayaran internasional di Selat Malaka dikarenakan Selat Malaka merupakan jalur penghubung antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia sehingga dikhawatirkan kapal-kapal besar, seperti kapal tanker, *container*, kapal tongkang, dan kapal-kapal lainnya akan mengalami kesulitan untuk melewati wilayah Selat Malaka. Selain itu, adanya kegiatan reklamasi yang dilakukan secara masif juga akan mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati bawah laut, sehingga mereka yang habitatnya disana harus bermigrasi dan mencari tempat tinggal lain.

Berdasarkan kasus permasalahan yang ada, Penulis akan meneliti mengenai akibat hukum dari adanya reklamasi di wilayah laut yang dilakukan oleh Singapura terhadap selat Malaka sebagai selat internasional dan menganalisis mengenai apakah Singapura sebagai negara pantai mempunyai hak untuk melakukan reklamasi di wilayah lautnya yang merupakan bagian

¹² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Yogyakarta, hlm. 81 diakses 29 Agustus 2019 pukul 08.55 WIB.

dari selat Malaka. Alasan penulis akan meneliti kasus permasalahan tersebut adalah karena belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai pembatasan terhadap kegiatan reklamasi di wilayah laut suatu negara pantai, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan atas negara tertentu untuk melakukan reklamasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalahnya adalah:

“Bagaimana akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis dalam penulisan ini digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, lebih khusus lagi pada akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap selat Malaka sebagai selat internasional.
2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Lembaga-lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS atau *International Tribunal For The Law of The Sea*), Mahkamah Internasional (ICJ atau *Internasional Court of Justice*), Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMO (*International Maritime Organization*), ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), dan Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan sengketa mengenai konflik yang terjadi akibat kebijakan reklamasi laut yang dilakukan oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.
- b. Pemerintah Indonesia agar dapat bersikap dan bertindak dengan tegas dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi akibat dari kebijakan reklamasi laut yang dilakukan oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.
- c. Penulis agar dapat memenuhi syarat kelulusan dalam Strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi berjudul akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional

ini bukanlah merupakan suatu bentuk plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Meskipun terdapat beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini, namun inti permasalahannya berbeda. Sebagai perbandingan, penulis menuliskan tiga skripsi yang pernah ada, yaitu sebagai berikut:

1. Immanuel Y Yoga P, 100510310, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017. Judul Skripsi: Konsep Negara Kepulauan Menurut Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) dalam Penyelesaian Sengketa Niger Gesong Antara Indonesia dengan Malaysia. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana peran penting konsep negara kepulauan dalam penyelesaian sengketa Niger Gesong antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia.

Hasil penelitiannya adalah inti permasalahan mengenai status hukum dan siapa negara yang mempunyai kedaulatan di Niger Gesong, sebelum masalah ini muncul Indonesia dan Malaysia telah duduk bersama dalam perjanjian bilateral tentang Landas Kontinen antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1969, dimana dalam perjanjian yang sudah disahkan ini Indonesia melalui plotting pada Peta mendapatkan 2/3 wilayah Niger Gesong, tetapi seiring berjalannya waktu Malaysia menerbitkan Peta Baru (1979) dimana Tanjung Datuk serta wilayah Niger Gesong di klaim secara sepihak. Sebagai Negara Kepulauan sesuai yang diperjuangkan Indonesia dan dituangkan dalam UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan yang dalam hal ini sesuai berdasarkan

Pasal 47 UNCLOS 1982, sehingga jika acuan negara kepulauan ini dibawa dalam proses negosiasi dengan Malaysia akan memberikan tawar menawar yang kuat dalam perundingan, karena dalam hal ini juga posisi Malaysia dipandang sebagai negara Kontinental atau Daratan bukan sebagai negara kepulauan.

2. M Farid Al Rianto, 1212011178, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016. Judul Skripsi: Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat Pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa batas wilayah laut negara pantai yang berhadapan dan berdampingan menurut UNCLOS dan bagaimanakah penyelesaian sengketa batas wilayah laut negara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Hasil Penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa batas wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 74 dan 83 yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui persetujuan (negosiasi) dengan merujuk pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

- b. Penyelesaian sengketa batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Sipadan dan Ligitan perlu ditindak lanjuti oleh kedua negara dengan adanya persetujuan antara kedua negara melalui perjanjian bilateral.
3. Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana, 130511244, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, Judul Skripsi: Akibat Hukum Klaim *Nine Dash Line* Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982. Rumusan masalahnya adalah bagaimana akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982.

Hasil penelitiannya adalah Indonesia sebagai salah satu negara yang wilayah perairannya berada di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim apapun atas Laut Cina Selatan tersebut. Sejak munculnya konflik kepemilikan atas Laut Cina Selatan, Indonesia selalu bertindak sebagai pencegah bagi negara-negara yang berkonflik atas kawasan tersebut. Namun, saat ini Indonesia mulai ikut terseret dalam pusaran konflik di Laut Cina Selatan ketika Cina mulai memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta *Nine Dash Line*. Hal tersebut membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina memanas. Situasi tersebut semakin memburuk ketika nelayan-nelayan Cina mulai masuk ke wilayah Indonesia dan

melakukan *Illegal Fishing* di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Akibat insiden tersebut, Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada Cina perihal tindakan nelayan-nelayannya yang menerobos masuk hingga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dilayangkannya nota protes tersebut menunjukkan sikap Indonesia yang menolak mengakui klaim Cina atas Laut Cina Selatan sekaligus menegaskan wilayah Natuna berada dalam yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya adalah dalam skripsi pertama, penulis lebih menekankan pada permasalahan mengenai status hukum dan negara manakah yang berhak atas kedaulatan di wilayah Niger Gesong. Dalam skripsi kedua, penulis lebih menekankan pada permasalahan mengenai bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa batas wilayah laut negara pantai yang berhadapan dan berdampingan menurut UNCLOS dan bagaimanakah penyelesaian sengketa batas wilayah laut negara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan, sedangkan dalam skripsi ketiga, penulis lebih menekankan pada permasalahan mengenai bagaimana akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982.

F. Batasan Konsep

1. Reklamasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperluas suatu wilayah yang dilakukan secara sengaja oleh negara tertentu dengan melakukan pengurukan wilayah.¹³
2. Laut Teritorial menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah jalur laut yang terletak pada sisi luar dan garis pangkal selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dimana pada bagian luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*).
3. Selat Internasional menurut Pasal 37 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 adalah selat yang digunakan dalam pelayaran internasional di antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya.
4. Negara Pantai (*coastal state*) menurut penafsiran oleh penulis dari Pasal 2 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 adalah negara berpantai dimana semua bentuk negaranya memiliki pantai, termasuk negara kepulauan. adalah negara berpantai dimana semua bentuk negaranya memiliki pantai, termasuk negara kepulauan.¹⁴

¹³ Wisnu Yudha AR, 2007, "Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dalam *Jurnal Global 4 Strategis*, Vol. 1 Nomor 2 Juli-Desember 2007, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 120 diakses 18 Oktober 2019 pukul 23.14 WIB.

¹⁴ Penafsiran dari Pasal 2 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 oleh penulis.

5. Lintas Transit menurut Pasal 38 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 adalah pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata dikhususkan untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.
6. Lintas Damai (*Innocent Passage*) menurut Pasal 19 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 adalah kebebasan bernavigasi bagi kapal asing untuk melewati wilayah laut negara lain secara damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan tentang akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini berupa data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982;
- 2) *Convention on The International Maritime Organization* 1948;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan terhadap *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982;
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Amendments to The Convention on The International Maritime Organization*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari

buku (literatur), jurnal, dan internet. Selain itu, pendapat hukum dan pendapat non hukum juga dapat diperoleh dari narasumber melalui proses wawancara maupun pemberian dokumen berupa data.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa *The Black's Law Dictionary* dan *Oxford Advanced Learner's Dictionary*.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang berupa buku (literatur), jurnal, internet, dan data-data terkait yang diberikan oleh Perwakilan Kedutaan Besar Singapura dan *United Nations Information Centre* (UNIC).

b. Wawancara, yaitu memperoleh data dari narasumber.

1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan terhadap

tugas dan kebijakan yang berkaitan di bidang kelautan dan perikanan.

a) Bapak Halid K. Jusuf selaku Kepala Subdirektorat Pengawasan
Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);

b) Bapak Darma Adiasa Saragih selaku Kepala Seksi Pengawasan
Produk Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
dan

c) Bapak Frista Yorhanita selaku Kepala Subdirektorat Reklamasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, yaitu:

a. Deskripsi Hukum Positif, yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer.

b. Sistematisasi Hukum Positif, yaitu secara vertikal dan horizontal.

1) Secara vertikal tidak ditemukan antinomi, karena Pasal-Pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan bahan hukum primer, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah eksklusi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

2) Secara horizontal tidak ditemukan antinomi, karena Pasal demi Pasal telah mengatur hal yang sama perihal dampak dari kegiatan reklamasi di wilayah selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional terhadap masyarakat internasional, sehingga telah membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan ini.

c. Analisis Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan bersifat *open system*, sehingga mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan dapat dikritisi, dievaluasi, dan dikaji serta bertumpu pada asas hukum. Dalam hal ini adalah mengkritisi peraturan perundang-undangan mengenai akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.

d. Interpretasi Hukum Positif

Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi hukum secara gramatikal, yaitu pengertian istilah yang digunakan dalam suatu kalimat dalam hukum positif berdasarkan bahasa sehari-hari yang lazim dipergunakan; interpretasi sistematisasi, yaitu mendasarkan pada sistem aturan dalam mengartikan suatu ketentuan hukum untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi, yaitu menafsirkan dengan cara memperhatikan maksud dan tujuan dari hukum positif yang dirumuskan melalui peraturan

perundang-undangan, dan interpretasi perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan berbagai stelsel hukum dari negara tertentu.

e. Menilai Hukum Positif

Penelitian ini menilai dalam hal menentukan sejauh mana negara Singapura dapat melakukan reklamasi laut di wilayah lautnya yang merupakan bagian dari selat Malaka dan akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura yang berdampak pada masyarakat internasional. Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku (literatur), jurnal, internet, dan pendapat narasumber yang nantinya akan dideskripsikan, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya, sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas mengenai akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.

5. Proses Berpikir/ Prosedur Bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar yang penulis gunakan adalah proses berpikir secara deduktif. Proses berpikir secara deduktif, yaitu proses berpikir yang berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura bagi negara lain dan yang khusus merupakan

hasil penelitian tentang akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika penulisan hukum/ skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/ skripsi ini sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/ variabel pertama, yaitu sejarah perkembangan hukum laut internasional dan status selat internasional menurut UNCLOS 1982. Konsep/ variabel kedua, yaitu pengertian negara dan batas wilayah, hak negara untuk melakukan reklamasi di wilayah lautnya, macam-macam hak lintas menurut UNCLOS 1982, dan kebijakan reklamasi di Singapura. Konsep/ variabel ketiga, yaitu analisis akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.

BAB III: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang berisikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada dan saran yang diberikan oleh penulis.